

LAMPIRAN

Lampiran 1: PEDOMAN WAWANCARA

Informan/kode : Sekretaris Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan / 01

Pertanyaan :

1. Perumusan kebijakan dan aturan:

Apakah proses perumusan kebijakan dan penyusunan aturan yang dibuat, melibatkan pihak lain, satker atau Kementerian/ Lembaga pada tahap pembahasan awal sampai akhir?

2. Pelaksanaan kegiatan :

- a. Apakah ada kendala dalam interaksi dan hubungan antara penyelenggara Program Bela Negara terkait pemberian informasi maupun pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Bela Negara?
- b. Bagaimana monitoring pelaksanaan program Bela Negara di daerah dengan sudah tidak ada lagi Kantor Wilayah Kemhan?

3. Mekanisme penyelenggaraan :

- a. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan program Bela Negara terkait birokrasi, dan kewenangan? Apakah ada hambatan dalam berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga?
- b. Apakah ada cara atau strategi yang digunakan untuk membantu penyelenggaraan program Bela Negara?
- c. Apakah program Bela Negara akan berlanjut seperti sekarang, atau berganti program, atau mungkin akan dihentikan?

Informan/kode : Kasubdit Penyusunan Evaluasi Kebijakan Strategis/ 02
Pertanyaan :

2. Pelaksanaan kegiatan :

- a. Apakah ada kendala dalam interaksi dan hubungan antara penyelenggara Program Bela Negara terkait pemberian informasi maupun pelaporan pelaksanaan usaha Bela Negara?
- b. Bagaimana monitoring pelaksanaan program Bela Negara di daerah dengan sudah tidak adanya lagi Kantor Wilayah Kemhan?
- c. Apakah ada satker yang menggantikan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kemhan terkait pelaksanaan program Bela Negara di daerah?
- d. Apakah program Bela Negara akan berlanjut seperti sekarang, atau berganti program, atau mungkin akan dihentikan?

Informan/kode : Kepala Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara / 03
Pertanyaan :

1. Perumusan kebijakan dan aturan :

- a. Apakah rumusan kebijakan dan penyusunan aturan yang dibuat, melibatkan pihak lain, satker atau Kementerian/ Lembaga pada tahap pembahasan awal sampai akhir?
- b. Apakah rumusan kebijakan dan penyusunan aturan yang dihasilkan oleh Subdit Lingdik dapat memwadahi kepentingan penerapan Bela Negara dalam lingkup pendidikan secara umum?
- c. Apakah ada kebijakan mengenai perlunya sertifikat atau nilai Bela Negara pada pendidikan umum sebagai syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi?
- d. Apakah contoh-contoh karakter/ tindakan moral yang mudah dipahami untuk dijadikan teladan terdapat dalam perumusan kebijakan yang dibuat? Seperti apa contohnya?

2. Pelaksanaan kegiatan :

- a. Apakah penyelesaian program kegiatan umumnya sesuai jadwal? Bila ada yang tidak terselesaikan, bagaimana cara yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasinya?
- b. Apa saja jenis program kegiatan yang dilakukan, apakah ada ketentuan akan banyaknya jumlah dari tiap-tiap jenis?
- c. Apakah jumlah personil pengawak di Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara sudah mencukupi dikaitkan beban tugas yang diberikan? Serta mempunyai pengalaman kerja di bidang Bela Negara di Dit BelNeg ataupun satker lain yang berkaitan dengan Bela Negara?

3. Mekanisme penyelenggaraan :

- a. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan terkait birokrasi, dan kewenangan? Apakah ada hambatan dalam berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga?
- b. Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan, baik internal maupun eksternal? Dalam pengintegrasian PKBN pada lingkup Diknas serta sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan.
- c. Apakah ada pelaporan pelaksanaan kegiatan Bela Negara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, instansi militer atau sipil, maupun kelompok yang membidangi pendidikan kepada Kemhan RI dalam hal ini Ditjenpothan dan ditembusi kepada Direktorat Bela Negara?
- d. Apakah program Bela Negara akan berlanjut seperti sekarang, atau berganti program, atau mungkin akan dihentikan?

Informan/kode : Kabid Perencanaan Pendidikan dan Latihan / 04

Pertanyaan :

2. Pelaksanaan kegiatan :

- a. Apakah ada kendala dalam interaksi dan hubungan antara penyelenggara Program Bela Negara terkait pemberian informasi maupun pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Bela Negara?
- b. Bagaimana monitoring pelaksanaan program Bela Negara di daerah khususnya pelaksanaan pendidikan dan latihan dengan sudah tidak ada lagi Kantor Wilayah Kemhan?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keiinginan seluruh lapisan masyarakat dalam mengikuti pendidikan dan latihan?
- d. Apakah program Bela Negara akan berlanjut seperti sekarang, atau berganti program, atau mungkin akan dihentikan?

Informan/kode : Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan Unhan RI/ 05

Pertanyaan :

- a. Apakah ada nama mata kuliah Bela Negara pada pendidikan jenjang D3, S1, S2 maupun S3?
- b. Bagaimana sinkronisasi dengan Puslit Bela Negara dan Pengabdian kepada masyarakat terkait materi dan pengembangan Bela Negara
- c. Bagaimana pelaksanaan internalisasi (Sosialisasi dan Diseminasi) kepada mahasiswa? Dan bagaimana Ditjenpothan membantu kegiatan internalisasi tersebut?
- d. Apakah program Bela Negara akan berlanjut seperti sekarang, atau berganti program, atau mungkin akan dihentikan?

Informan/kode : Kabiid Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pusdiklat
Tekfunghan/ 06

Pertanyaan :

- a. Apakah ada relevansi dan kesamaan materi Diklat yang disusun oleh Pusdiklatteckfunghan dengan kegiatan internalisasi Bela Negara yang dilakukan oleh Ditjenpothan maupun Diklat yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara?
- b. Apakah ada peran serta penyelenggara Bela Negara dhi Ditjenpothan dan Pusdiklat Bela Negara dalam pelaksanaan Diklat Tekfunghan
- c. Menurut Bapak/ Ibu, melihat dari luar lingkup Bela Negara, apakah program Bela Negara akan berlanjut seperti sekarang, atau berganti program, atau mungkin akan dihentikan?

Informan/kode : Kapuslit Bela Negara dan Pengabdian kepada
masyarakat LPPM Unhan RI/ 07

Pertanyaan :

- a. Apakah perlu ada nama mata kuliah Bela Negara pada pendidikan jenjang D3, S1, S2 maupun S3?
- b. Bagaimana sinkronisasi dengan Biro Akademik dan Kemahasiswaan terkait materi dan pengembangan Bela Negara dalam
- c. Bagaimana pelaksanaan internalisasi (Sosialisasi dan Diseminasi) kepada mahasiswa? Dan bagaimana Ditjenpothan membantu kegiatan internalisasi tersebut?
- d. Apakah program Bela Negara akan berlanjut seperti sekarang, atau berganti program, atau mungkin akan dihentikan?

Informan/kode : Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran,
Kemendikbudristek / 08

Pertanyaan :

1. Perumusan kebijakan dan aturan:

Dalam rapat-rapat, koordinasi atau pokja terkait perumusan kebijakan dan penyusunan aturan seperti UU, PP, Perpres, Permenhan, maupun Permendikbud tentang pengintegrasian Bela Negara ke dalam Sisdiknas, Internalisasi maupun Diklat, apakah melibatkan Kemhan, Kemdikbudristek dan KL terkait lainnya?

2. Pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan :

- a. Apakah program Bela Negara akan berlanjut seperti sekarang, atau berganti program, atau mungkin akan dihentikan?
- b. Bagaimana tindak lanjut dari pengintegrasian nilai-nilai Bela Negara ke dalam Sisdiknas? Sejauh mana pelaksanaan pengintegrasian dilaksanakan?
- c. Bagaimana monitoring pelaksanaan integrasi ke dalam Sisdiknas pada semua jenjang pendidikan dilaksanakan?
- d. Bagaimana mekanisme penyampaian hasil monitoring/pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi?
- e. Permenhan 8 Tahun 2022 pasal 11 menyatakan, pengintegrasian serta pelaksanaan Internalisasi dilaporkan oleh Mendikbud, Menag, Kepala Daerah kepada Menhan, bagaimana pendapat bapak dan bagaimana pelaporannya?

Informan/kode : Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Dit KSKK Madrasah
Ditjen Pendidikan Islam Kemenag / 09

Pertanyaan :

1. Perumusan kebijakan dan aturan:

Dalam rapat-rapat, koordinasi atau pokja terkait perumusan kebijakan dan penyusunan aturan seperti UU, PP, Perpres, Permenhan, maupun Permendikbud tentang pengintegrasian Bela Negara ke dalam Sisdiknas, Internalisasi maupun Diklat, apakah melibatkan Kemhan, Kemdikbudristek dan KL terkait lainnya?

2. Pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan :

- a. Apakah program Bela Negara akan berlanjut seperti sekarang, atau berganti program, atau mungkin akan dihentikan?
- b. Bagaimana tindak lanjut dari pengintegrasian nilai-nilai Bela Negara ke dalam Sisdiknas? Sejauh mana pelaksanaan pengintegrasian dilaksanakan?
- c. Bagaimana monitoring pelaksanaan integrasi ke dalam Sisdiknas pada semua jenjang pendidikan dilaksanakan?
- d. Bagaimana tanggapan secara umum dari peserta didik dan pendidik pada setiap jenjang pendidikan terkait pengintegrasian nilai-nilai Bela Negara maupun sosialisasi yg pernah didapatkan?

Informan/kode : Dosen Filsafat Pancasila dan PKN Unika Atmajaya
Jakarta / 10

Pertanyaan :

- a. Apa pendapat mahasiswa terhadap program Bela Negara yg dijalankan oleh Pemerintah saat ini?
- b. Bagaimana tanggapan mahasiswa maupun pengajar/dosen, terkait integrasi nilai-nilai Bela Negara ke dalam sistim pendidikan?
- c. Apakah mahasiswa/ dosen dan staf sudah pernah mendapatkan sosialisasi atau mengikuti diklat Bela Negara?
- d. Apakah program Bela Negara perlu dilanjutkan, diganti program atau dihentikan?
- e. Apakah ada permintaan dari Universitas atau Kemhan yang meminta pihak Universitas menyiapkan mahasiswa dan pengajar/dosen utk menerima sosialisasi atau mengikuti diklat?

Informan/kode : Kepala SMAN I Batam / 11

Pertanyaan :

- a. Bagaimana tanggapan dari anak-anak didik maupun pengajar terkait integrasi nilai-nilai Bela Negara ke dalam sistim pendidikan dan Sosialisasi?
- b. Apakah program Bela Negara perlu dilanjutkan, diganti dgn program lain dgn materi yg relatif sama atau dihentikan?
- c. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan sosialisasi, apakah ada permintaan dari sekolah atau Kemhan dhi Dit Bela Negara meminta pihak sekolah utk menyiapkan siswa dan pengajar, sesuai program sasaran kegiatan dari Kemhan?

Lampiran 2: DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Sesditjen Pothan



Wawancara dengan Kabiro AK Unhan RI



Wawancara dengan Kasubdit Sunevajakstra Ditjakstra Ditjen Strahan



Wawancara dengan Kabid Rendiklat Pusdiklat Bela Negara



Wawancara dengan Kasubdit Lingdik Dit Belneg Ditjen Potnan



Wawancara dengan staf Subdit Lingdik Dit Belneg Ditjen Potnan



Wawancara dengan Kabid Evkatmutu Pusdiklat Tekfunghan



Wawancara: Dosen Filsafat Pancasila dan PKN Unika Atmajaya jakarta

Lampiran 3: TABLE TRIANGULASI SUMBER

Upaya Kemhan RI dalam Merumuskan Kebijakan, Penyusunan Aturan terkait Program Bela Negara dalam lingkup pendidikan

No	Pertanyaan Penelitian	Informan 1	Informan 3	Informan 8	Informan 9	Keterangan
1	Apakah proses perumusan kebijakan dan penyusunan aturan yang dibuat, melibatkan pihak lain, satker atau Kementerian/ Lembaga pada tahap pembahasan awal sampai akhir?	Proses perumusan kebijakan dan penyusunan aturan yang dibuat, tentunya melibatkan satker atau kementerian/ lembaga yang terkait dan berdasarkan tataran kewenangan dari satker atau kementerian/ lembaga masing-masing. Contoh: Penyusunan Permenhan No 8 Tahun 2022 tentang pedoman PKBN yang melibatkan satker Roturdang, Biro Hukum, Badiklat maupun dari Kemendikbud, Kemendagri, Kemenpan, Kemenkumham, Kemenku, Kemenpan RB dan lain-lain, sesuai UU No 12 Tahun 2011.	Dalam merumuskan kebijakan menyusun aturan, pokja yang dibentuk sudah terdiri dari berbagai instansi ataupun K/L, sehingga pelibatan pihak lain di luar Dit Bela Negara selalu dilakukan sesuai dengan tatanan kewenangan satker tersebut. Terlebih saat akan meminta tanda tangan pemimpin K/L, maupun pimpinan instansi atau satker yang terlibat pada tahap akhir proses juga dilakukan walaupun memakan waktu yang agak lama, karena kesibukan pemimpin tersebut.	Setiap perumusan kebijakan selalu melibatkan K/L terkait, seperti penyusunan Permenhan No 8 Tahun 2022, Kemendikbudristek ikut terlibat dalam penyusunan substansi pedoman PKBN lingkup pendidikan	Program Bela Negara menjadi salah satu materi Matsama (masa taaruf siswa madrasah) yang diadakan awal T.A Dan BN juga menjadi materi dalam mata pelajaran Fikih dan PPKn, serta hidden curriculum, dalam bentuk pembiasaan akhlak mulia dalam keseharian dan kegiatan ekstrakurikuler	Keterlibatan pihak lain di dalam perumusan kebijakan dan penyusunan aturan adalah kegiatan yang selalu dilakukan untuk menghindari adanya kepentingan pribadi / kelompok ditetapkan untuk melaksanakan keinginan publik. Dimana masukan yang ada dianggap dapat mewakili instansi terkait pendidikan utk kepentingan bersama.

2	Apakah rumusan kebijakan dan penyusunan aturan yang dihasilkan oleh Subdit Lingdik dapat mewadahi kepentingan penerapan Bela Negara dalam lingkup pendidikan secara umum?		Penerapan program Bela Negara lingkup pendidikan adalah sebagian dari pelaksanaan usaha Bela Negara yang dibebankan kepada Direktorat Bela Negara. Secara umum kebijakan dan aturan yang dihasilkan dapat mewadahi kepentingan penguatan nilai-nilai Bela Negara pada generasi penerus dalam jenjang sistem pendidikan nasional. Dimana keterlibatan pihak lain dalam perumusan selalu diikutsertakan dalam tahapan-tahapan kegiatan.			Pembahasan kebijakan dan aturan tidak hanya membahas terkait pendidikan tetapi juga lingkup pekerjaan dan pemukiman dan ketentuan lainnya bersamaan Sehingga keterwadahan kepentingan Bela Negara dalam ingkup pendidikan lebih valid lagi, dengan adanya masukan dari bidang lain
---	---	--	---	--	--	--

Pelaksanaan Kegiatan Program Bela Negara Pada Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara

No	Pertanyaan Penelitian	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Informan 5	Informan 6	Informan 7	Keterangan
1	Apakah ada kebijakan mengenai perlunya sertifikat atau nilai Bela Negara pada pendidikan umum sebagai syarat untuk melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi?			Kalau mata pelajaran Bela Negara dalam sisdiknas belum ada, mungkin nantinya bisa saja ada nama mata pelajarannya sehingga ada nilai untuk Bela Negara, tetapi ketentuan tentang nama mata pelajaran Bela Negara belum ada Dalam kurikulum sisdiknas, Bela Negara dimasukkan pada mata pelajaran PPKN, tentunya sudah ada standar nilai PPKN yang dibutuhkan untuk kenaikan kelas ataupun untuk kelulusan. Untuk jenjang SD-SMA mungkin yang perlu ditingkatkan adalah nilai KKM (Kemampuan Kompetensi Mininum), untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Bela Negara. Saat ini yang diberikan terhadap					Pemberian sertifikat Kader dan Fasilitator Bela Negara merupakan hal penting untuk membangun konstruksi makna sebagai upaya menghargai pelaksanaan upaya Bela Negara. Sertifikat Bela Negara tersebut belum digunakan sebagai bagian dari syarat mutlak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

				peserta didik maupun pendidik adalah bukti sebagai kader Bela Negara bagi yang telah mengikuti sosialisasi maupun diklat. Untuk tingkat lanjutan pemberi materi dalam PKBN harus sudah memiliki sertifikat sebagai fasilitator kader Bela Negara.					
2	Apakah ada contoh-contoh karakter/ tindakan moral yang mudah dipahami untuk dijadikan teladan terdapat dalam perumusan kebijakan yang dibuat? Seperti apa contohnya?			Karakter tindakan moral yang mudah dipahami adalah melalui kegiatan program sosialisasi dan diseminasi dan diklat serta program ILM, kopi daring, dan kampanye Bela Negara. Contohnya ILM dalam bentuk animasi Bela Negara, talk show, ngopi daring dan sebagainya Cara-cara yang dilakukan untuk menerapkan usaha Bela Negara sudah dituangkan dalam kebijakan pada Permenhan No 8 Tahun 2022 tentang Pedoman PKBN. Dalam lampiran I					Contoh dan teladan adalah suatu cara yang ampuh dan merupakan suatu pola yang mudah dipahami untuk mempengaruhi orang lain baik secara langsung ataupun tidak. Dengan kata lain perbuatan harus sesuai dengan ucapan, adalah salah satu contoh yang baik

				Permenhan tersebut, rinci dijelaskan bagaimana mengintegrasikan Bela Negara kedalam sisdiknas sesuai jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Contohnya bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan yang juga dilakukan oleh guru atau pendidik. Dimana menggambarkan pemberian contoh/ teladan kepada peserta didik.					
3	Apakah ada kendala dalam interaksi dan hubungan antara penyelenggara Program Bela Negara terkait pemberian informasi maupun pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Bela Negara? dan Bagaimana	Tidak ada kendala terkait pemberian informasi maupun pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Bela Negara. Setelah tidak ada lagi Kantor Wilayah Kemhan di daerah,	Pada dasarnya pelaporan pelaksanaan Bela Negara, heavynya ada di Ditjenpothan, menindaklanjuti seberapa besar kader Bela Negara		Pelaporan sudah di laksanakan secara berjenjang akan tetapi ke depan di sarankan utk kegiatan kegiatan Sosialisasi, Desiminasi dan Program Diklat Bela Negara di berikan anggaran yang lebih sehingga warga Negara Indonesia yang antusias mengikuti				Hubungan antara penyelenggara program Bela Negara dan penyelenggara dengan sasaran/ target program Bela Negara merupakan gambaran fungsi monitoring dan komitmen sungguh-sungguh akan

	<p>monitoring pelaksanaan program Bela Negara di daerah dengan sudah tidak ada lagi Kantor Wilayah Kemhan? Kemudian</p>	<p>pelaksanaan program Bela Negara yaitu melalui instansi terkait yang ada di daerah sesuai lingkup kegiatan program masing-masing. Sebagai contoh, program kegiatan Bela Negara Subditlingdik. Ditbelneg tentunya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Profinsi/ Kota/ Kabupaten setempat.</p>	<p>yang sudah di bentuk. Bila tidak perwakilan Kemhan di daerah, Bela Negara tidak bisa dilaksanakan. Depo Bela Negara di Kodam-Kodam adalah untuk binter, pembinaan teritorial bukan implementasi kebijakan program Bela Negara.</p>		<p>kegiatan diatas bisa di fasilitasi. Dan dalam pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi oleh Dit Bela Negara agar diikutsertan perwakilan dari Pusdiklat Bela Negara untuk antisipasi tindakan/ respon cepat apabila ada keinginan target untuk mengikuti diklat Bela Negara. Setelah tidak ada lagi Kantor Wilayah Kemhan di daerah. Pada saat sekarang Kementerian Pertahanan tidak memiliki lagikepanjangan tangan di daerah dan provinsi provinsi. Saat ini kegiatan Kemhan di titipkan di Kodam-Kodam, walaupun tidak</p>				<p>pelaksanaan program Bela Negara</p>
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

					<p>berjalan optimal. PTF Kemhan atau sejenisnya sudah dihapuskan sehingga Kemhan tidak dapat melaksanakan program-programnya termasuk Diklat Program Bela Negara.</p> <p>Disarankan PTF Kemhan kembali dibentuk untuk mengakomodir program-program Kemhan di daerah. Yang dilakukan saat ini, bekerjasama dengan K/L dan Pemda dengan mengintensifkan Internalisasi serta supervisi diklat Bela Negara</p>				
4	Apakah program Bela Negara akan berlanjut seperti sekarang, atau berganti program, atau	Program Bela Negara akan berlanjut dengan memperhatikan	Program Bela Negara akan tetap berlanjut, tidak akan berhenti,		Program Bela Negara harus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui sosialisasi, desiminasi dan diklat yang	Program Bela Negara, kalau untuk dihentikan tidak, tetapi	Program Bela Negara tidak akan hilang selama negara masih ada,	Program Bela Negara sudah mulai berjalan dan saya yakin dengan program sinkronisasi	Keinginan akan keberlanjutan program Bela Negara merupakan karakter komitmen,

	mungkin akan dihentikan?	program jangka lima tahun kedepan yang sudah disahkan pemerintah, sesuai dengan regulasi Bela Negara.	tinggal implementasinya seperti apa		manfaatnya dirasakan oleh alumni sangat besar dihadapkan kepada perkembangan zaman dengan ancaman potensial/ nyata yang menyerang kedaulatan NKRI	akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan lingstra	khususnya TNI yang memegang tugas dan fungsinya adalah membela negara dengan jiwa dan raganya	dengan Sisdiknas, maka kedepan akan semakin baik. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan Menhan dan Mendiknas beserta stake holder terkait yang memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengintegrasian PKBN ke dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan serta pelaksanaan Internalisasi.	pelaksanaan penerapan yang tepat adalah kelanjutannya dan merupakan komitmen tindakan. Hal inilah menjadi karakteristik yang diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, penyelenggara maupun masyarakat sebagai cara mempercepat pemahaman Bela Negara dan terbentuknya Karakter Bela Negara kepada semua elemen masyarakat.
--	--------------------------	---	-------------------------------------	--	---	--	---	--	--

5	<p>Apakah penyelesaian program kegiatan umumnya sesuai jadwal?, Apa saja jenis program kegiatan yang dilakukan, apakah ada ketentuan akan banyaknya jumlah dari tiap-tiap jenis? Apakah jumlah personil pengawak di Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara sudah mencukupi dikaitkan dengan beban tugas? Serta mempunyai pengalaman kerja di bidang Bela Negara di Dit BelNeg ataupun satker lain yang terkait Bela Negara?</p>			<p>Pada umumnya pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai jadwal. Jenis program yang dilaksanakan yaitu, sosialisasi dan diseminasi PKBN lingkup pendidikan tingkat PAUD, Dasar dan Menengah, lingkup pendidikan agama tingkat Dasar dan Menengah, termasuk yang di daerah serta melalui program ILM baik medsos dan radio Sedangkan jumlah dari tiap-tiap jenis kegiatan/ program disesuaikan dengan anggaran yang ada.</p> <p>Untuk jumlah personel pengawak Subdit ILngdik sudah mencukupi dan mempunyai pengalaman kerja di bidang yang berkaitan dengan Bela Negara.</p> <p>Jumlah personil di Subdit Lingdik masih belum sesuai (tambahan dari Kasubbag TU Dit Bela Negara).</p>				<p>Pelaksanaan program secara tepat waktu menjadi salah satu indikator kegiatan yang baik. Jenis kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya menerapkan Bela Negara sebagai kegiatan yang mudah diterima, dipahami karena masuk kedalam sistem kehidupan masyarakat sehari-hari. Pengawakan personil pada Subdit Lingdik perlu dilengkapi untuk fokus melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.</p>
---	--	--	--	---	--	--	--	---

6	Apakah ada relevansi dan kesamaan materi Diklat dengan kegiatan internalisasi Bela Negara yang dilakukan oleh Ditjenpothan maupun Diklat yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara? dan apakah ada peran serta penyelenggara Bela Negara dhi Ditjenpothan dan Pusdiklat Bela Negara dalam pelaksanaan Diklat Tekfunghan?					Kegiatan diklat di Tekfunghan seperti prajab CPNS memiliki agenda materi Bela Negara, yang mengajar dari personil tekfunghan yang telah memiliki sertifikasi sebagai fasilitator. Juga kolaborasi dengan satker lain. Untuk materi lainnya Tekfunghan mempunyai materi sendiri.		Kerjamana dan koordinasi yang baik sesama penyelenggara pendidikan dalam mengintegrasikan Bela Negara dalam Sisdiknas termasuk pada jenjang pendidikan pada lingkup penyelenggara program Bela Negara dilaksanakan dengan baik untuk mengembangkan upaya Bela Negara kedepannya dan menghindari tumpang tindih kewenangan.
7	Apakah perlu ada nama mata kuliah				Pada jenjang S2 ada		Menurut pendapat saya perlu.	Pembentukan konstruksi makna dapat

	<p>Bela Negara pada pendidikan jenjang D3, S1, S2 maupun S3? Bagaimana sinkronisasi dengan Biro Akademik dan Kemahasiswaan/ dengan Puslit Belneg PKM terkait materi dan pengembangan Bela Negara? Bagaimana pelaksanaan internalisasi (Sosialisasi dan Diseminasi) kepada mahasiswa? Dan bagaimana Ditjenpothan membantu kegiatan internalisasi tersebut?</p>					<p>mata kuliah KBBN dan Filsafat Ilmu Pertahanan. Jenjang S1 tidak ada, tetapi terkandung dalam bbrp mata kuliah. Implementasi pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari KKDN juga penelitian yang dilakukan adalah terkait Bela Negara. Dalam pelaksana</p>		<p>Pada awal mula perkuliahan, mereka dapat mengikuti program Diklat Bela Negara selama 3-5 hari yang memuat materi Refreshing dari materi dasar, inti dan pendukung Bela Negara. Disebut Refreshing atau penyegaran karena mata pelajaran ini tentunya sudah diterimakan pada masa SMA atau setingkat sebelumnya, yaitu antara lain 1.</p>	<p>dilakukan dengan penamaan Bela Negara sebagai nama mata pelajaran, pemberian sertifikat Bela Negara serta pengulangan materi pelajaran/ kegiatan secara terpola. Hal ini dilakukan untuk menanamkan Bela Negara kepada peserta didik agar menjadi suatu hal yang akrab dan mudah dipahami untuk dilaksanakan.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>an KKDN, bila ada temuan di lapangan akan menjadi masukan bagi prodi. Secara garis organisasi Unhan adalah <i>Thinktank</i> nya Kemhan, sehingga kebijakan Kemhan terkait Bela Negara sesuai dengan yang di implemen tasikan oleh Unhan.</p>		<p>Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 2. Empat Konsensus Dasar Negara 3. Tataran Dasar Bela Negara 4. Wawasan Kebangsaan 5. Wawasan Nusantara 6. Kearifan Lokal 7. Ketahanan Nasional 8. Kepemimpin an 9. Sistem Pertahanan Semesta 10. Pencegahan dan Penanggulan gan Terorisme 11. Pencegahan Korupsi 12. Pengetahuan Cyber.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

8	<p>Bagaimana tanggapan mahasiswa, siswa maupun pengajar/dosen terkait integrasi dan Internasilasi nilai-nilai Bela Negara dalam lingkup pendidikan?</p>	<p>(Informan 10) Mahasiswa umumnya mengikuti saja arahan dan pengajaran yang diberikan dalam Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mahasiswa di semua kelas saya merasakan penting dan urgennya Bela Negara terutama di era globalisasi yg sangat terbuka ini, dimana ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan sangat luas spektrumnya. Sosialisasi maupun pelatihan dan sarasehan Bela Negara dari bagi mahasiswa dan para dosen di kampus-kampus belum merata dan terlaksana sesuai keinginan. Bela Negara adalah hubungan yang merekatkan Negara dan Rakyat, Negara adalah wadah dan Rakyat adalah isinya, apa artinya wadah bila tidak ada isi, demikian sebaliknya isi ditaruh dimana bila tidak ada wadah. Jadi rakyat harus mempertahankan eksistensi negara dengan membela negara sehingga negara akan tetap eksis sebagai tempat keberadaan rakyat</p>	<p>(Informan 11) Sosialisasi yang dilakukan cukup bagus dan para siswa sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Bela Negara. Secara pelaksanaan beberapa materi Bela Negara ada dalam kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka, paskib (paskibraka) dan latihan dasar kepemimpinan, dimana kegiatan ini sangat diminati oleh anak-anak. Materi yang diberikan lebih mengena bila dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan, karena ketertarikan anak-anak lebih tinggi bila dilaksanakan dengan kegiatan dari pada teori di kelas. Apalagi kalau melibatkan aparat TNI pasti akan lebih meningkatkan semangat dan kebanggaan.</p>	<p>Kepatuhan dari target ataupun sasaran program Bela Negara sangat mempengaruhi bertahannya semangat Bela Negara. Kepatuhan/keinginpatuhan masyarakat dapat dilihat dari tanggapan/respon yang diperoleh. Kepatuhan yang diharapkan adalah bukan karena paksaan, sehingga pemahaman yang benar akan memperkokoh semangat Bela Negara.</p>
---	---	--	--	--

Birokrasi Mekanisme Penyelenggaraan Program Bela Negara di Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara

No	Pertanyaan Penelitian	Informan 1	Informan 3	Informan 4	Informan 8	Informan 9	Informan 10	Informan 11	Keterangan
1	Bagaimana mekanisme penyelenggaraan program Bela Negara terkait birokrasi, dan kewenangan? Apakah ada hambatan dalam berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga?	Mekanisme penyelenggaraan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait berdasarkan tataran kewenangan dari instansi tersebut pada bagian yang membidangi Bela Negara. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dengan kementerian dan lembaga tidak ada kendala.	Mekanisme dalam penyelenggaraan birokrasi disesuaikan dengan tatanan kewenangan institusi terkait dan sementara ini tidak ada hambatan.				Mekanisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bentuk pendahuluan pengetahuan Bela Negara	Mekanisme pada awalnya dari Kemhan meminta Disdik untuk menyiapkan siswa dan pengajar terkait kegiatan sosialisasi Bela Negara, kemudian Disdik mengarahkan ke SMAN 1 Batam untuk koordinasi lebih lanjut.	Birokrasi ditentukan oleh struktur organisasi pada penyelenggara program Bela Negara, level pangkat dan jabatan penyelenggara program dan kewenangan Dimana hal ini dapat sebagai jaminan pelaksanaan yang cepat dan tepat.
2	Apakah ada cara atau strategi yang digunakan untuk membantu penyelenggaraan	Cara atau strategi yang digunakan adalah dengan mempelajari					Uraian tentang Bela Negara harus jelas dan benar-	Materi yang diberikan lebih kepada pelaksanaa	Cara yang digunakan adalah memangkas/ pembaharuan


	program Bela Negara?	regulasi yang berkaitan dengan program Bela Negara tersebut dan sosialisasi regulasi tersebut kepada masyarakat					benar terkait erat dengan keberlangsungan eksistensi NKRI dan tercapainya cita-cita dan tujuan nasional	n kegiatan, dari pada teori kelas. Kerjasama dengan TNI ditingkatkan, ada keinginan ikut kegiatan Bjr TNI AL	n birokrasi dengan lebih memahami program Bela Negara, sosialisasi yang lebih intens
3	Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan, serta sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan? Apakah ada pelaporan pelaksanaan kegiatan Bela Negara dari Kementerian, instansi militer atau sipil, maupun kelompok yang membidangi pendidikan kepada Kemhan RI dalam hal ini Ditjenpothan dan ditembusi kepada Direktorat Bela Negara?		Kemudian untuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik internal dan eksternal cukup baik. Untuk pelaporan, sejauh ini penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan Bela Negara K/L berupa penyampaian persurat atas kegiatan program yang dilaksanakan oleh K/L terkait kegiatan Bela Negara dengan mitra pemateri/narasumber	Untuk pemantauan pelaksanaan program Bela Negara yang sudah dilakukan adalah dengan mengunjungi/ meninjau target/ sasaran yang sudah pernah melaksanakan Ditlat Bela Negara	Mekanisme pelaporan yang biasa dilaksanakan terkait rencana aksi nasional dilaporkan oleh satker terkait dan dihimpun oleh Biro Perencanaan yang kemudian dilaporkan ke kementerian terkait.	Berupa supervisi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para pengawas madrasah dan kepala madrasah, pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi tidak secara khusus hanya memonitoring Bela Negara saja.			Pelaporan dari target terkait kegiatan Program Bela Negara yang sedang dan sudah dilaksanakan adalah salah satu cara mengetahui tingkat keberhasilan Penyelenggara perlu lebih intensif lagi agar memiliki data yang valid terkait perkembangan program Bela Negara.

Lampiran 4: RIWAYAT HIDUP

Hotma Ivan D.P. Sirait, lahir di Medan pada 6 Juni 1970. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak H.S. Sirait, SKM (Alm) dan ibu P.L. Pasaribu. Menamatkan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah Atas di Kota Medan Sumatera Utara dan menyelesaikan S-1 jurusan Teknik Mesin di STTAL Surabaya. Pada tahun 2021 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan pada Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan dan menyelesaikannya pada tahun 2022.

Peneliti lulus dari Akademi TNI Angkatan Laut dengan Korps Teknik pada 27 Juli 1991 (Angkatan 37/ 91). Mengawali karir dengan mengikuti pendidikan Pasis angkatan ke-4 selama setahun di Kodikal Surabaya. Selanjutnya penugasan di Kolinlamil Jakarta, KRI Tg. Oisina 972 sebagai Aspasinban sampai awal tahun 1993, kemudian Kadepban KRI Mentawai 959 sampai tahun 1997, dan diperbantukan (Detasir) di KRI Teluk Kau 504 pada akhir 1996 sampai awal 1997. Pada tahun 1997 sampai 2000 mengikuti pendidikan S-1 di STTAL Surabaya. Beberapa penugasan di staf yaitu, sebagai Kasubdit Opsang dan Kadisang Lantamal I Belawan selama 5 tahun sampai tahun 2005. Kemudian sebagai Kafasharkan Sabang NAD sampai Oktober 2006. Selanjutnya bertugas di Lantamal III Jakarta selama 3,5 tahun di staf Slog dan Kadisfaslan serta sebagai staf di Disfaslanal Mabelsal selama 5 tahun. Pada tahun 2015 dipercayakan menjabat Aslog Lantamal XIV Sorong di Papua Barat selama 3 tahun, kemudian mutasi ke Bakamla Jakarta sebagai Kasubditduklat selama 2 tahun. Pada tahun 2020 sebagai staf ahli LF Pangkoarmada 1 Jakarta, sebelum mengikuti dik S-2 Unhan RI. Peneliti sudah berkeluarga dan dikarunia dua orang anak, laki-laki dan perempuan.

Lampiran 5: LAIN-LAIN

		KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN RI Terakreditasi BAN-PT "A"
Nomor	W/ 2612 /VIII/2022	Jakarta, 24 Agustus 2022
Klasifikasi	: Biasa	
Lampiran	: Satu Lembar	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	Kepada
	Tesis Mahasiswa Prodi SPS	Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
	Unhan RI a.n. Kolonel Laut (T)	di
	Hotma Ivan D.P. Sirait	Tempat

1. Dasar:

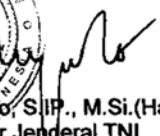

- a. Keputusan Rektor Unhan RI Nomor: KEP/298/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan RI Tahun Anggaran 2022.
- b. Keputusan Rektor Unhan RI Nomor: KEP/213/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Kalender Akademik Program Magister (S2) Universitas Pertahanan RI TA. 2021/2022.
- c. Surat Perintah Rektor Unhan RI Nomor: SPRIN/871/IV/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Bimbingan Tesis Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI TA. 2021/2022.

2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya pejabat dalam lampiran berkenan mengizinkan mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort-13 Universitas Pertahanan RI TA. 2021/2022 atas nama Kolonel Laut (T) Hotma Ivan D.P. Sirait NIM 120210101009 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Penerapan Program Bela Negara Kementerian Pertahanan Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta".

3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person e-mail* hivandp.sirait@gmail.com dan HP 0853-1141-1237.

4. Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih atas kerjanya.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Dekan Fakultas Strategi Pertahanan,



 Dr. Priyanto, S.IP., M.Si.(Han)
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan RI
2. Warek I, Warek II dan Warek III Unhan RI
3. Kasatwas Unhan RI
4. Karo Unhan RI.

Kawasan IPSC Sentul, Kab. Bogor, Jawa Barat 16810 (Kampus Utama)
 Jalan Salemba Raya No. 14 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430 (Kampus Satelit)
 Fatuketki, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur 85752 (Kampus Satelit)
 Website: www.idu.ac.id

Lampiran Surat Rektor Unhan RI
Nomor : B/2012/VIII/2022
Tanggal : 24 Agustus 2022

DAFTAR NAMA NARASUMBER

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI.
2. Kepala Subdirektorat Penyusunan Evaluasi Kebijakan Strategis, Direktorat Kebijakan Strategis Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI.
3. Kepala Subdirektorat Lingkungan Pendidikan, Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI.
4. Kepala Bidang Perencanaan Pendidikan dan Latihan, Pusdiklat Bela Negara Badan Pendidikan dan Latihan, Kementerian Pertahanan RI.
5. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unhan RI.
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Dekan Fakultas Strategi Pertahanan,



[Handwritten Signature]
S. P. M.Si.(Han)
Jenderal TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 2612 /VIII/2022 Jakarta, 24 Agustus 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : —
Hal : Permohonan Izin Penelitian Kepada
Tesis Mahasiswa Prodi SPS Unhan RI a.n. Kolonel Laut (T) Hotma Ivan D.P. Sirait Yth. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Keputusan Rektor Unhan RI Nomor: KEP/298/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan RI Tahun Anggaran 2022.
 - b. Keputusan Rektor Unhan RI Nomor: KEP/213/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Kalender Akademik Program Magister (S2) Universitas Pertahanan RI TA. 2021/2022.
 - c. Surat Perintah Rektor Unhan RI Nomor: SPRIN/871/IV/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Bimbingan Tesis Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI TA. 2021/2022.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya pejabat dalam lampiran berkenan mengizinkan mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort-13 Universitas Pertahanan RI TA. 2021/2022 atas nama Kolonel Laut (T) Hotma Ivan D.P. Sirait NIM 120210101009 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Penerapan Program Bela Negara Kementerian Pertahanan Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person e-mail hivandp.sirait@gmail.com dan HP 0853-1141-1237.*
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih atas kerja samanya.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Dekan Fakultas Strategi Pertahanan,

Dr. Priyanto, S.I.P., M.Si.(Han)
Mayor Jenderal TNI

- Tembusan:
1. Rektor Unhan RI
 2. Warek I, Warek II dan Warek III Unhan RI
 3. Kasatwas Unhan RI
 4. Karo Unhan RI.